



**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR : W13.U5/ 24 /SK/OT.00/II/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
  - c. Bahwa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/42/ SK/OT/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sudah mengalami mutasi dan promosi di tempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;
  - d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
  - e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
  - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
  - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/ 42/SK/OT/VII /2020 Tanggal 1 Juli 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 27 Januari 2021

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA**

  
**AMINUDDIN**  
NIP. 196509031992031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
 Nomor : W13.U5/24 /SK/OT/1/2021  
 Tanggal : 22 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN  
 NEGERI BANTUL**

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL AMINUDDIN, S.H.,M.H
Ketua	WAKIL KETUA Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL RUDI SAFARI, S.H.,M.H
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

AREA I (MANAJEMEN PERUBAHAN)	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PIDANA AGUS SUPRIYONO, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PIDANA SUHARNA, S.H.,M.H.
	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H
	CAHYA MULYANTO, A.Md
Sekretraris	AANG PRABOWO, S.H

AREA II (PENATAAN TATA LAKSANA)	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA EVI INSIYATI, S.H.,M.H.
Anggota	PANITERA MUDA PERDATA YULITA SRI WIDAYATI,S.H
	NURUSSOBAN, S.H.,M.H
	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H
	SATRIA PINANDITA, SE
Sekretaris	UTTUNGA SAHISNU, S.H

AREA III (PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM)	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA NIKEN KUSUMARATRI S, S.H.
	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B.
	WAWAN ARI PRABOWO
Sekretaris	ASIANI LAKOBI, S.E

AREA IV (PENGUATAN AKUNTABILITAS)	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: JOHAN WAHYUDI, S.E.
	YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md
Sekretaris	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.,Md

AREA V (PENGUATAN PENGAWASAN)	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H
Anggota	PANITERA MUDA HUKUM AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H
	MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H.
	PRASETYA SUJADI, S.H
	ARIEF SETYO WIBOWO, SH
Sekretaris	DIAH PRAVITASIWI, S.H

AREA VI (PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK)	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H.,M.H
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P
	ANGGORO SETIAWAN, S.Sos.,S.H
	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H
	DIYAN RAHMAWATI
Sekretaris	HENDRA ANDREA, A.Md

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003